

# Masih Ditemukan WNA Masuk DPT Pemilu 2019

Caleg Partai Demokrat Endang Kusumawati sudah tiga kali mangkir

Hari / tanggal : Jumat, 29 Maret 2019  
Waktu : Pukul 14.00 WIB - selesai  
Tempat : Puri Asri 1 & 2 Room  
Hotel Le Meridien Lantai 1  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 18-20, Jakarta Pusat 10220

dengan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

1. Laporan Tahunan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Penegawai Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018;
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2018;
3. Pemberian Newenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menunjuk Kantor Akungan Publik Independen yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019;
4. Penetapan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan; dan
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan.

Penjelasan:

- a. Untuk Mata Acara Rapat ke-1 sampai dengan ke-4 merupakan mata acara yang rutin dilakukan dalam Rapat Umum Saham Perseroan dan Penegang Saham Tahunan Perseroan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan Rapat Umum Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019.
- b. Untuk Mata Acara Rapat ke-5 dilaksanakan antara lain karena adanya pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dan Direksi, serta pengangkatan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirim undangan terbersdiri kepada para Penegang Saham, Penegang Saham yang beranggap sebagai uniteran sesuai ketentuan yang berlaku.
2. Penegang Saham yang beranggap bahwa Rapat adalah yang namanya tercatat dalam Daftar Penegang Saham Perseroan pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019 sampai dengan Rapat Umum Saham Perseroan di Bursa Efek Indonesia (Bursa), pada hari Selasa, tanggal 5 Maret 2019.
3. Penegang Saham atau Kuasanya yang akan menghadiri Rapat diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tandatanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendataan sebelum memasuki Ruang Rapat.
4. Bagi Penegang Saham dalam penitipan Kolektif KSEI maka selain fotokopi KTP, juga dimohon untuk menyertakan Konfirmasi Terulis Untuk Rapat (KUTR) yang dapat diperoleh pada anggota Bursa/Bank Kustodian Penegang Rekening Efek KSEI.
5. Penegang Saham berbentuk badan hukum, agar memerlukan fotokopi Anggaran Dasarnya yang berakhir serta akta pengantikan anggota Direksi dan Dewan Komisaris atau Pengurus terakhir dan (sebagaimana mungkin penerjemahnya) fotokopi KTP dan Penitipan dan Penegara Kuasa.
6. Penegang Saham yang tidak dapat hadir dapat dilakukannya Penegang Saham lain atau orang lain dengan Surat Kuasa. Para Penegang Saham yang akan memberikan Kuasa dapat mengambil Formulir Surat Kuasa (Proxy Letter) di Sekretariat Perseroan atau Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan pada hari dan jam kerja, yaitu:

PT Datindo Entrycom  
Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10120  
Telepon: +62 21 350 8078  
Faksimili: +62 21 350 8078

7. Surat Kuasa tersebut harus dilandangkan di atas material Rp. 6.000,- dan sudah ditentara oleh BAE Perseroan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum tanggal Rapat, yaitu hari Selasa, tanggal 26 Maret 2019.
8. Anggota Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku Kuasa dalam Rapat, namun suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam Rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara.
9. Bahkan-bahan Rapat sudah tersedia di Kantor Perseroan sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019.
10. Penegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat penyelenggaraan Rapat 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 6 Maret 2019  
PT Baramuli Sukseswara Tbk  
Direksi



dobel sumber pembiayaan.

Untuk pemeriksaan ini polisi tidak perlomenunggu jawaban surat dari bupati.

Masih terkait dana desa, Anggota Komite IV DPD RI dari dapil Daerah Istimewa Yogyakarta, Cholid Mahmud, mengapresiasi pengelolaan dana desa di tingkat kelurahan. Saat ini dana bantuan ke-

lurahan sebesar Rp3 triliun diambil dari Dana Desa. "Dari APBN 2019 dialokasikan dana alokasi umum tambahan sebesar Rp3 triliun dan masuknya ke APBD," terang Cholid di Kantor DPD RI Yogyakarta, kemarin.

Nanun, ia cermati banyak lurah ketakutan dan terbeli dengan adanya dana kelurahan. Terutama bagaimana mengelola ang-

garan. Alasannya ketekberatan personel di kelurahan rata-rata 5-6 orang. Adapun dana kelurahan itu akan cair pada April mendatang asalkan usulan program sudah jadi. Padat tahan awal dicairkan 50% dan sisanya 50% dicairkan Agustus.

Pada bagian lain Gubernur Jawa Tengah mencanangkan program Satu Dinas Satu Desa Miskin, kemarin. Program ini memprioritaskan 745 desa binaan di 14 kabupaten. (M/G)  
AT/H/N-2)

127 orang memiliki KTP-E dan 132 WNA lainnya sudah pada bagian lain, dalam dua

melalui laporan perseroan.

Pada bagian lain, dalam dua

melalui laporan perseroan